

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran DKI Disahkan Meskipun Masih Dipersoalkan

Pemerintah DKI belum memberikan kajian dan analisis teknis pada sejumlah mata anggaran.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah DKI Jakarta telah bersepakat untuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Namun beberapa anggota Dewan masih mempersoalkan sejumlah mata anggaran. Alasannya, pemerintah provinsi belum memberikan rekomendasi, kajian, dan analisis teknis pada sejumlah mata anggaran yang dipersoalkan itu.

"Data rinci baru diberikan menjelang pembahasan. Lalu penjelasannya hanya mengandalkan opini lisan dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Idris, kemarin. "Itu sulit sekali dijadikan pegangan."

Fraksi PSI, kata Ahmad Idris, setidaknya masih mempersoalkan tiga mata anggaran yang dinilai paling berpolemik. Di antaranya adalah anggaran proyek pembangunan

rute 2 kereta *light rail transit* (LRT) Pulogadung-Kebayoran Lama. Proyek yang akan dikerjakan Dinas Perhubungan dan PT Pembangunan Jaya ini membutuhkan dana Rp 68,7 miliar. Fraksi PSI menilai, proyek ini berpotensi melanggar peraturan karena menyerahkan seluruh pembangunan LRT kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Selain itu, PSI masih mempersoalkan anggaran penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 1,6 triliun, pengadaan komputer Rp 128,6 miliar di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), serta pengadaan pos Rp 160 miliar di Dinas Pemadaman Kebakaran. "Anggaran nilainya ratusan miliar rupiah tapi tak pernah dipaparkan bagaimana perbandingan harga dan kualitas dengan merek yang berbeda. Tak ada juga kajian yang jelas," kata Idris.

Ahmad Yani, anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, juga menyebut

sejumlah anggaran yang dinilai menuai polemik. Misalnya anggaran gaji dan dana operasional Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang tetap disetujui Rp 19,8 miliar. Selain itu, ada anggaran revitalisasi Taman Ismail Marzuki sebesar Rp 200 miliar.

Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan anggaran untuk TGUPP belum final meski telah diketok Rp 19,8 miliar. Menurut dia, anggaran itu harus dikurangi karena Dewan hanya setuju membiayai 50 anggota TGUPP, bukan 67 orang seperti yang diajukan pemerintah. "Nanti sisa uang TGUPP masuk ke pos anggaran biaya tak terduga (BTT)," kata Prasetyo. "Kami juga akan sidak (inspeksi mendadak) kerja TGUPP."

Pejabat pelaksana tugas Kepala Bappeda DKI Jakarta, Suharti, mengatakan pemerintah provinsi memang berencana mengurangi jumlah anggota TGUPP sesuai dengan keputusan DPRD. Namun

pemerintah memerlukan waktu untuk menerapkan kebijakan tersebut. "Tak bisalangsung. Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang harus dipatuhi," kata dia.

Gubernur Anies Baswedan menyatakan siap mempelajari semua masukan dan catatan yang diberikan anggota legislatif dalam proses pengesahan Rancangan APBD 2020. Menurut dia, seluruh program dan proyek di Ibu Kota memang perlu perhatian dan kerja sama berbagai *stakeholder*, termasuk masyarakat. Dia berjanji menjalankan semua program dalam Rancangan APBD 2020 sesuai dengan tenggat yang ditetapkan.

● TAUFIQ SIDDIQ | ADAM PRIREZA

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

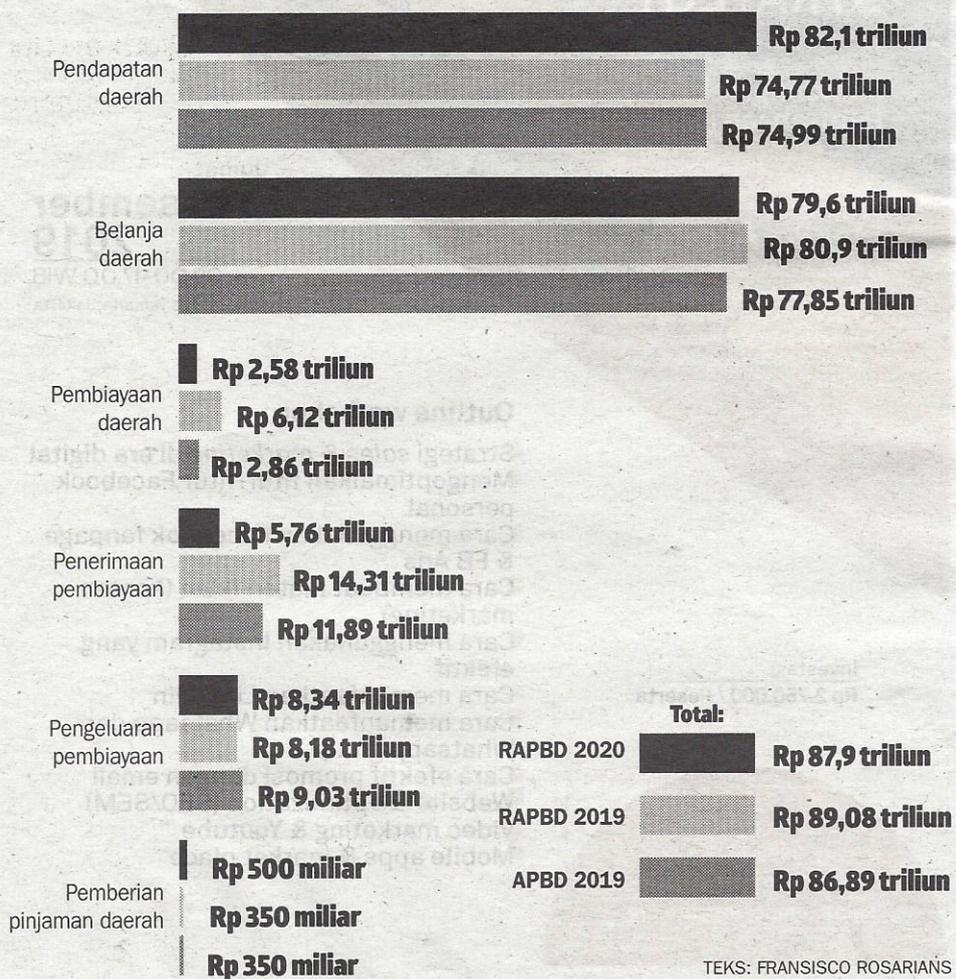
Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran DKI Disahkan Meskipun Masih Dipersoalkan

Naik Sedikit Dibanding Tahun Lalu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020. Dari pembahasan anggaran yang kurang dari dua bulan itu, akhirnya ditetapkan total rencana APBD sebesar Rp 87,9 triliun.



TEKS: FRANCISCO ROSARIANS